

UPACARA ADAT YANG MEMANFAATKAN PENYU DAN KEBUTUHAN DAGING PENYU UNTUK PESTA PERNIKAHAN OLEH MASYARAKAT PULAU ENGGANO

Meiske Anggeline Virera Tambunan, Wiryono dan Gunggung Senoaji

Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian UNIB
Jl. WR. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu 38371A
angelinavirera@gmail.com

ABSTRAK

Pulau Enggano merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang secara administratif berada di Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Secara astronomis Pulau Enggano terletak pada koordinat 05°31'13" LS dan 102°16'00"BT. Pulau Enggano memiliki enam desa diantaranya yaitu, desa Kahyapu, Kaana, Malakoni, Apoho, Meok dan Banjarsari. Keenam desa ini dihuni oleh masyarakat asli maupun pendatang. Masyarakat asli Pulau Enggano terdiri dari enam sub suku (puak), lima diantaranya ialah Suku Kauno, Kaitora, Kaaohoa, Kaarubi, Kaaruba, dan satu suku lainnya yaitu Kamay merupakan sebutan untuk masyarakat pendatang. Suku asli ini memiliki tradisi yang unik, yaitu memanfaatkan penyu dalam upacara adat setempat. Tradisi ini dinilai sebagai kontroversi bagi beberapa pihak, karena bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia dan peraturan dunia terhadap Penyu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upacara adat apa saja yang memanfaatkan penyu serta kebutuhan daging penyu pada pesta pernikahan di Pulau Enggano. Pengambilan data dilakukan pada bulan Mei 2017, metode yang dilakukan dalam pengambilan data primer melalui wawancara dan observasi. Teknik penentuan sampel yang digunakan ialah purposive sampling dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pemanfaatan penyu. Kriteria responden terdiri dari Aparat Pemerintahan, Kepala Suku dan Warga yang telah mengadakan pesta pernikahan pada tahun 2016. Hasil yang diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upacara adat yang menggunakan penyu ada dua yaitu upacara pernikahan adat dan upacara buka pantang bagi kepala suku yang meninggal dunia. Upacara lain yang kadang-kadang (tidak wajib) menggunakan penyu ialah peresmian kampung baru, acara serah terima jabatan Kepala Desa, acara syukuran, acara tahun baru, dan acara penyambutan tamu kehormatan. Rata-rata penyu yang digunakan untuk pesta pernikahan bulan Maret - Oktober 2016 di Enggano ialah sebanyak 16 ekor, dengan kebutuhan daging pertahun mencapai 11.200 kg atau 11,2 ton. pesta pernikahan adat dalam setahun tidak diketahui secara pasti.

Kata Kunci : *Penyu, Adat, Pulau Enggano*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan tingkat keanekaragaman yang tinggi, sehingga Indonesia disebut sebagai negara mega biodiversity sekaligus pusat keanekaragaman hayati di dunia (Suhartini, 2009). Keanekaragaman hayati dipahami sebagai keberagaman dari makhluk hidup yang terjadi akibat perbedaan-perbedaan seperti perbedaan ukuran, bentuk, warna, tekstur, dan sifat-sifatnya (Yasri, 2015). Perbedaan ini dibuktikan dengan adanya 28.000 jenis tumbuhan, 350.000 jenis hewan dan 10.000 mikrobia yang diperkirakan hidup alami, tersebar pada 47 tipe ekosistem di Indonesia (Astirin, 2000).

Kenyataan yang tengah dihadapi Indonesia ialah perubahan ekosistem secara terus menerus hingga melebihi batas kemampuan untuk memulihkan diri. Akibatnya, terjadi kemerosotan keanekaragaman hayati yang berlangsung dengan sangat cepat (Zuhud, 1989). Populasi Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) dilindungi yang berada di daerah pesisir juga mengalami penurunan secara signifikan. Tingginya aktivitas perburuan dan perdagangan ilegal, ancaman terhadap habitat yang disebabkan perubahan fungsi lahan, serta tertangkap tidak sengaja (*by catch*) oleh jaring insang menjadi penyebab penurunan populasi TSL (Susanto, 2016). Konservasi keanekaragaman menjadi solusi untuk menghambat laju kerusakan habitat dan kehilangan spesies lebih banyak. Menurut World Conservation Union (IUCN) dalam Harahap (2015), pengertian kawasan konservasi ialah luas lahan/daratan dan laut yang diperuntukkan untuk perlindungan dan pemeliharaan keanekaragaman hayati, dan sumber daya

alam yang terhubung dengan budaya yang terkait, dan dikelola melalui penerapan hukum atau dengan cara efektif lainnya.

Beberapa tahun terakhir, upaya konservasi yang memanfaatkan kearifan lokal masyarakat setempat menjadi sorotan yang mencerahkan dunia konservasi. Kearifan lokal merupakan cerminan dari adanya keragaman budaya di Indonesia. Menurut Nurrohman (2013), keragaman budaya di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah bangsa Indonesia, selain itu kebudayaan di Indonesia bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan dari berbagai kebudayaan kelompok suku bangsa yang ada di suatu daerah, sehingga tiap kelompok suku memiliki tradisi yang berbeda-beda dalam memanfaatkan sumber daya alam serta cara untuk melestarikannya.

Pulau Enggano, sebagai salah satu pulau terluar Indonesia yang berada di Provinsi Bengkulu turut menyumbang keragaman budaya ini. Masyarakat Pulau Enggano terdiri dari enam suku (puak), lima diantaranya yaitu Kauno, Kaitora, Kaaohoa, Kaarubi dan Kaaruba, sedangkan satu suku lainnya yaitu Kamay merupakan sebutan untuk masyarakat pendatang di Pulau Enggano. Suku asli ini memiliki tradisi adat yang unik, yaitu memanfaatkan penyu dalam upacara adat setempat.

Pemanfaatan penyu untuk dikonsumsi dalam upacara adat di Pulau Enggano menjadi kontroversi beberapa pihak. Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Hayati dan Ekosistem, penyu merupakan hewan dilindungi, masuk dalam daftar Red List IUCN (*International Union For Conservation of Nature and Natural Resources*) sebagai hewan yang terancam punah (*threatened species*), bahkan masuk kedalam apendiks I oleh CITES (*Convention on International Trade of Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) yang artinya Penyu merupakan hewan terancam yang tidak boleh diperdagangkan. Pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat Pulau Enggano memperlihatkan suatu pelanggaran terhadap Undang-undang Republik Indonesia dan peraturan dunia terhadap Penyu. Berdasarkan latar belakang inilah yang kemudian membuat peneliti tertarik untuk mengetahui kebutuhan daging penyu dan dalam tradisi apa saja penyu dimanfaatkan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan April – Mei 2017 di Pulau Enggano yang Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu.

Penentuan Sampel. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive sampling. Menurut Sugiyono, (2017) purposive sampling merupakan teknik yang masuk dalam teknik nonprobability sampling yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Teknik tersebut dilakukan dengan pertimbangan agar peneliti mudah menganalisis, mendeskripsi serta menarasikan suatu fenomena. Responden dalam penelitian ini ditentukan dengan kriteria sebagai berikut: (1) Aparat Pemerintah, (2) Ketua Suku DAN (3) Warga yang mengadakan pesta pernikahan tahun 2016 dan yang memanfaatkan penyu dalam pesta pernikahan.

Teknik pengambilan sampel terhadap kriteria tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan data yang diinginkan atau didapat oleh peneliti.

Metode Pengumpulan Data. Metode pengumpulan data dilakukan dengan terhadap dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan observasi dan wawancara. Wawancara dilakukan terhadap : (1) Warga yang mengadakan pesta pernikahan yang memanfaatkan penyu pada tahun 2016 berjumlah lima orang.(2) Aparat Pemerintahan berjumlah lima orang.DAN (3) Kepala Suku berjumlah 1 orang.

Pengumpulan data sekunder diperoleh dari literatur yang memiliki relevansi dengan penelitian baik melalui studi pustaka maupun dari instansi terkait seperti jumlah populasi penyu,

aturan adat tertulis dan lain sebagainya. Data sekunder dapat pula berupa data monografi desa dan peta Pulau Enggano.

Analisis Data. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Metode analisis data deskriptif kualitatif berguna untuk mengembangkan teori yang telah dibangun dari data yang didapatkan di lapangan. Hasil pengumpulan data dianalisis dalam bentuk kalimat, simbol dan data lainnya (Abdi, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemanfaatan Penyu dalam Upacara Adat Masyarakat Pulau Enggano. Pemanfaatan penyu di Pulau Enggano dalam upacara adat sudah ada secara turun temurun. Penyu dianggap sebagai simbol perdamaian bagi masyarakat setempat. Dalam upacara adat Pulau Enggano, kewajiban penggunaan penyu terdapat dua upacara adat yaitu, upacara adat pernikahan dan upacara adat buka pantang bagi kepala suku yang meninggal. Buka pantang dalam adat istiadat di Enggano merupakan kegiatan membuka larangan yang ditetapkan oleh pemuka adat selama masa berkabung.

Berdasarkan wawancara mendalam terhadap responden, diketahui bahwa penyu tidak sekedar digunakan dalam upacara adat saja, bahkan dalam pesta pernikahan yang tidak menggunakan adat juga dalam kegiatan peresmian perumahan baru, penyambutan tamu kehormatan, serah terima jabatan kepala desa, syukuran, dan acara tahun baru. Selain dimanfaatkan dagingnya sebagai hidangan, karapas penyu juga diolah menjadi cenderamata.

Pemanfaatan Penyu dalam Pesta Pernikahan di Pulau Enggano. Pemanfaatan penyu telah menjadi tradisi yang sulit terpisahkan dari kehidupan masyarakat pulau Enggano. Tanpa ada upacara/ritual adat pun, masyarakat umumnya tetap menggunakan penyu sebagai hidangan dalam pesta pernikahan. Selama satu tahun terdapat kurang lebih lima pasangan yang menikah dan menggunakan penyu sebagai hidangan. Jumlah penyu yang digunakan dalam pesta pernikahan bervariasi. Adapun jumlah penyu yang digunakan dalam pesta pernikahan responden tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 10. Jumlah penyu yang digunakan dalam pesta pernikahan

No	Nama Responden	Waktu Menikah	Jumlah Penyu
1	Verawati	Maret 2016	10 Ekor
2	Rika Wahyuni	Mei 2016	20 Ekor
3	Yeni Novita Sari	Agustus 2016	10 Ekor
4	Tri Handayani	September 2016	20 Ekor
5	Yuliawati	Oktober 2016	20 Ekor
Total			80 Ekor
Rata-rata			16 ekor

Sumber : Data primer, 2017

Tabel 10 menunjukkan bahwa jumlah penyu yang ditangkap dan digunakan dalam pesta pernikahan rata-rata berjumlah 16 ekor/pesta pernikahan. Berdasarkan taksiran responden berat daging seekor penyu dapat mencapai 50 kg, sehingga apabila pada tahun 2016 terdapat 14 pesta pernikahan dengan asumsi semua pesta menggunakan penyu maka jumlah kebutuhan daging penyu per tahun dapat mencapai 11.200 kg atau 11,2 ton daging penyu. Pada kenyataannya, tidak semua pesta pernikahan menggunakan penyu, hal ini berkaitan dengan adanya masyarakat pendatang yang tidak mengkonsumsi penyu. Jumlah pesta pernikahan adat dalam setahun tidak diketahui secara pasti.

Jumlah penyu yang tersaji dalam tabel 10 belum termasuk penggunaan penyu sebagai hidangan dalam upacara diluar adat seperti upacara syukuran, tahun baru, kepala suku yang

wafat, dan lain sebagainya. Responden mengatakan bahwa umumnya penyu dikonsumsi pada saat upacara adat saja, namun apabila tersedia penyu diluar upacara adat ataupun tertangkap tidak sengaja oleh jaring (*by catch*), maka responden ikut mengkonsumsi pula. Menurut responden, dalam upacara pesta pernikahan, jumlah penyu yang dihidangkan tidak dibatasi, tergantung pada jumlah yang didapat.

Responden dari aparat pemerintahan memberikan pendapat yang berbeda. Jumlah penyu yang boleh dihidangkan hanya satu ekor sebagai syarat. Responden lainnya berpendapat, bahwa penyu yang boleh dihidangkan sekitar 3 – 4 ekor. Kepala Suku mengatakan bahwa, jumlah maksimal yang boleh dihidangkan sebanyak 4 ekor dan hanya boleh digunakan pada saat upacara adat saja.

Tabel 11. Pendapat responden mengenai penyu yang diperbolehkan

Kategori Responden	Jumlah Responden Yang Berpendapat Jumlah penyu yang diperbolehkan				Total
	1 ekor	3 – 4 ekor	4 ekor	Tidak dibatasi	
Warga yang telah menikah	-	-	-	5	5
Aparat Pemerintah	2	3	-	-	5
Kepala Suku	-	-	1	-	1
	Total				11

Sumber : Data primer, 2017

Pengetahuan Tentang Penyu Hewan Dilindungi. Pengetahuan menjadi dasar yang penting dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang terancam punah, salah satunya dalam upaya pelestarian serta pencegahan penyu dari kepunahan. Responden menyatakan pendapat yang berbeda mengenai pengetahuannya tentang penyu. Berikut disajikan jumlah responden yang mengetahui penyu hewan dilindungi.

Tabel 12. Pengetahuan Responden tentang Penyu Hewan dilindungi

Kategori Responden	Jumlah Responden Yang Berpendapat			
	Ya	Mungkin	Tidak	Tidak Tahu
Warga yang telah menikah	3	-	1	1
Aparat pemerintah	5	-	-	-
Kepala Suku	1	-	-	-
Total	9	-	1	1

Sumber : Data Primer, 2017

Hasil wawancara terhadap responden yang mengadakan pesta pernikahan mengungkapkan bahwa, beberapa responden mengetahui bahwa penyu adalah hewan yang dilindungi, sebagian lagi berpendapat penyu bukanlah hewan yang dilindungi, dan ada pula yang tidak mengetahuinya. Sementara itu responden dari aparat pemerintahan dan Kepala Suku mengetahui bahwa penyu adalah hewan yang dilindungi. Tingkat pengetahuan responden tidak hanya dipengaruhi faktor pendidikan, karena pengetahuan dapat diperoleh melalui pendidikan non-formal (Putri, 2012). Namun ada faktor lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan responden yaitu lingkungan pekerjaan. Lingkungan sekitar maupun lingkungan pekerjaan dapat membantu akses informasi bagi responden, sehingga pengetahuan yang didapat responden dapat meningkat (Herminingrum, 2017).

Pengetahuan tentang penyu wajib digunakan dalam Pesta Pernikahan. Menurut KBBI, wajib berarti sesuatu yang harus dilaksanakan dan akan ada sanksi apabila tidak dilaksanakan. Responden memiliki pengetahuan yang berbeda mengenai kewajiban penggunaan penyu didalam upacara. Perbedaan pengetahuan tersebut tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 13. Pengetahuan tentang penyus wajib digunakan dalam upacara

Kategori Responden	Jumlah Responden Yang Berpendapat			
	Wajib	Tidak Wajib	Wajib Upacara Tertentu	Tidak Tahu
Warga yang telah menikah	2	2	-	1
Aparat pemerintah	4	1	-	-
Kepala Suku	1	-	-	-
Total	7	3	-	1

Sumber : Data Primer, 2017

Beberapa responden yang telah menikah menyatakan bahwa penggunaan penyus tidak diwajibkan dalam pesta pernikahan, mengingat ada banyak upacara yang menggunakan penyus sebagai hidangan dan ada pula yang tidak menggunakannya, sebagian lagi mengatakan bahwa penyus wajib digunakan. Aparat pemerintah dan kepala suku menyatakan penyus wajib digunakan, dan hanya satu responden yang menyatakan tidak wajib. Hasil wawancara mendalam, diketahui bahwa masyarakat menganggapnya sebagai pengganti daging tetapi tidak wajib, hal ini serupa dengan pernyataan yang dikemukakan beberapa responden yang telah menikah. Keterbatasan daging seperti daging ayam, sapi dan kambing di Pulau Enggano menjadi alasan penggunaan penyus. Jumlah hewan populasi ternak di Kecamatan Enggano tahun 2015 untuk ternak Kambing 346 ekor, sapi potong 295 ekor, dan kerbau 81 ekor. Sedangkan untuk perikanan laut tangkap yang diproduksi mencapai 1.727 ton. Responden yang telah menikah juga mengaku bahwa dalam menyelenggarakan pesta pernikahan, selain menghadirkan penyus mereka juga menghadirkan daging lain yaitu sapi dan ayam, namun kedua jenis daging ini biasanya diimpor dari Kota Bengkulu.

Aparat pemerintahan dan Kepala suku yang menyatakan penyus wajib digunakan dalam pesta pernikahan secara adat, beranggapan bahwa penggunaan penyus dalam upacara adat digunakan sebagai syarat. Apabila penyus tidak ada dalam upacara adat tersebut maka akan terjadi musibah bagi yang menyelenggarakan upacara adat tersebut. Menurut adat istiadat setempat, penyus dilambangkan sebagai simbol perdamaian, berdasarkan sejarah peperangan yang terjadi antar suku di Pulau Enggano. Sehingga menghadirkan penyus dalam upacara adat pernikahan dimaksudkan sebagai lambang perdamaian antar dua keluarga, dan pada upacara adat buka pantang bagi kepala suku, dilambangkan sebagai lepas dari kesedihan.

Pengetahuan tentang Aturan Adat Pemanfaatan Penyus dan Sanksinya. Aturan adat merupakan suatu panduan dalam menjalankan norma-norma dan kebiasaan kehidupan yang berlaku. Responden menyatakan pendapat yang berbeda tentang adanya aturan adat yang mengatur pemanfaatan penyus dalam upacara adat.

Tabel 14. Pengetahuan tentang Aturan Adat Pemanfaatan Penyus

Kategori Responden	Jumlah Responden Yang Berpendapat			
	Ada (Tertulis)	Ada(Tidak Tertulis)	Tidak Ada	Tidak Tahu
Warga yang telah menikah	-	-	2	3
Aparat pemerintah	2	-	3	-
Kepala Suku	1	-	-	-
Total	3	-	5	3

Sumber : Data Primer, 2017

Responden yang telah menikah menyatakan bahwa tidak ada aturan adat yang mengatur tentang pemanfaatan penyus, sebagian lagi menyatakan tidak tahu. Beberapa aparat pemerintahan pun mengatakan bahwa aturan adat tersebut tidak ada. Responden yang menyatakan tidak ada atau tidak tahu ini, beranggapan bahwa penggunaan penyus sudah menjadi tradisi turun temurun.

Begitu pula dengan sanksinya, ada responden yang mengetahui bahwa ada sanksi secara adat apabila memanfaatkan atau mengkonsumsi penyu diluar adat. Tingkat pengetahuan responden terhadap sanksi pelanggaran pemanfaatan penyu diluar adat, tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 15. Pengetahuan tentang Sanksi Pemanfaatan Penyu diluar adat

Kategori Responden	Jumlah Responden Yang Berpendapat			
	Ada	Mungkin	Tidak Ada	Tidak Tahu
Warga yang telah menikah	-	1	2	2
Aparat pemerintah	1	-	4	-
Kepala Suku	1	-	-	-
Total	2	1	6	2

Sumber : Data primer, 2017

Responden yang telah menikah menyatakan tidak ada sanksi terhadap pemanfaatan penyu diluar adat, satu responden menyatakan mungkin ada, tetapi tidak tahu bentuk sanksinya. Aparat pemerintahan sebagian besar juga menyatakan bahwa sanksi tersebut tidak ada. Wawancara mendalam terhadap salah seorang responden berpendapat bahwa sanksi tersebut tidak ada karena asas kekeluargaan dan toleransi yang di anut masyarakat setempat. Sementara seorang responden aparat pemerintah menyatakan bahwa sanksi itu ada, namun berbentuk teguran lisan. Kepala Suku menyatakan bahwa baik aturan adat beserta sanksinya terhadap pemanfaatan penyu telah diatur.

Aturan adat mengenai pemanfaatan penyu tersebut beserta sanksinya tertulis dalam Keputusan Kepala Suku tahun 2009, Nomor: 02/KPS/Ka.S/E/2009, tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam, Satwa dan Hewan, Serta Pembukaan Lahan, Pengelolaan dan Pelestarian Kawasan Pesisir Pulau Enggano dalam Upaya Penyelamatan Pulau Enggano dari Ancaman Abrasi. Dalam keputusan Kepala Suku tersebut tertulis dalam BAB V Pasal 1 ayat 3, bahwa penangkapan penyu hanya diperkenankan untuk upacara adat dan pesta adat, apabila aturan tersebut dilanggar maka akan dikenakan sanksi berupa denda adat sebesar Rp. 2.500.000 dan oknum yang melanggar harus membuat upacara adat dengan menghadirkan kepala suku serta tokoh adat untuk meminta maaf.

Tidak tertulis secara eksplisit didalam keputusan Kepala Suku tersebut mengenai upacara adat apa saja yang boleh menggunakan penyu, berapa jumlah dan ukurannya. Berdasarkan tingkat pengetahuan responden terhadap aturan adat beserta sanksinya, menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan penyu di Pulau Enggano masih lemah. Lemahnya penegakan hukum ini, didasarkan pada tingginya tingkat toleransi terhadap sesama, terlebih lagi pemanfaatan penyu dalam hampir setiap upacara telah menjadi tradisi.

Proses Penangkapan Penyu. Dalam pesta pernikahan masyarakat pulau Enggano, ada suatu tradisi bernama *Panama'au*. *Panama'au* merupakan tradisi mengumpulkan warga untuk pembagian tugas dalam persiapan upacara pernikahan hingga berlangsungnya upacara pernikahan. Pembagian tugas ini dibagi menjadi beberapa regu seperti regu memasak, regu mencari ikan, regu menangkap penyu dan lain sebagainya.

Regu penangkap penyu biasanya akan mencari pada waktu siang atau malam hari pada saat laut pasang. Penyu dicari sewaktu akhir bulan, atau sewaktu Bulan menunjukkan fase Bulan baru, masyarakat setempat menyebut periode tersebut dengan bulan gelap atau anak bulan. Masyarakat beranggapan bahwa keadaan bulan gelap akan membuat penyu lebih mudah untuk didapat. Penyu ditangkap di daerah sebalik pulau menggunakan perahu nelayan, selama $\pm 3 - 7$ hari. Alat yang digunakan untuk menangkap penyu menggunakan tempuling dan jaring. Tempuling digunakan apabila menangkap penyu di malam hari, sementara jaring digunakan untuk menangkap penyu di siang hari.

Jenis penyu yang tertangkap ialah penyu sisik (*Eretmochelys imbricate*), masyarakat menyebutnya sebagai penyu karang dan penyu hijau (*Chelonia mydas*) yang disebut masyarakat sebagai penyu biasa. Sistem *panama'au* yang dilakukan oleh masyarakat pulau Enggano tidak menuntut harga yang harus dibayar terhadap penyu yang didapat, regu yang mencari penyu ini hanya diberi biaya untuk membeli bahan bakar perahu dan konsumsi selama di laut. Namun apabila jumlah penyu yang dibutuhkan dalam upacara pernikahan dirasa kurang oleh Tuan rumah atau pihak penyelenggara, maka penyu dibeli dari nelayan desa lain dengan harga sekitar Rp. 50.000 – Rp. 250.000/ekor. Salah seorang responden mengatakan, dalam pesta pernikahannya harga penyu yang dibeli senilai Rp. 700.000/8 ekor. Berat seekor penyu tergantung ukuran, penyu sisik yang memiliki panjang tubuh 87 cm memiliki berat sekitar 80 kg (Lekha, 2017), sedangkan penyu hijau yang memiliki panjang tubuh 80 – 150 cm memiliki berat sekitar 132 kg (Rosadi, 2014). Menurut responden, ukuran penyu yang dimanfaatkan tidak ada batasan, responden menggambarkan ukuran penyu dalam bentuk besaran benda lain. Apabila penyu yang didapat masih kecil, maka dikembalikan lagi ke laut. Hasil penelitian Rahmat (2016), penyu hijau yang di tangkap untuk konsumsi upacara pernikahan di Pulau Enggano memiliki ukuran 55 cm – 75 cm, dengan total penyu yang diukur sebanyak 24 ekor. Dalam hal pengawasan penangkapan penyu untuk upacara adat, secara teknis Kepala Suku hanya mengatur *panama'au*, namun tidak turut ke laut untuk mengawasi proses penangkapan.

Upaya Pelestarian Penyu. Penyu memegang peranan dalam keseimbangan ekosistem perairan dangkal, seperti misalnya penyu hijau pemakan lamun, dengan kedudukannya sebagai konsumen tingkat I, maka Penyu hijau berperan sebagai pengendali lamun. Jika penyu hijau tidak ada, maka populasi lamun meningkat dan menyebabkan pertumbuhan bakteri patogen, *Labrynthulla*, sehingga membuat ekosistem lamun menjadi tidak sehat dan berdampak pada populasi ikan (Azkab, 1999). Hal ini menunjukkan peran penyu hijau sebagai bio indikator kesehatan suatu pantai atau laut. Sewaktu masih kecil (tukik) Penyu hijau memangsa ubur-ubur sebagai makanan. Ubur-ubur dikenal sebagai pemangsa ikan-ikan kecil di laut, sehingga secara tidak langsung Penyu hijau menjadi penyeimbang rantai makanan. (Purnama, 2015). Penyu hijau mampu menempuh jarak ribuan mil laut, berperan dalam menyebarkan nutrisi melalui kotorannya (Guntoro, 2008). Penyu sisik sebagai hewan pemakan bunga karang, memiliki peranan dalam mengendalikan laju pertumbuhan bunga karang yang dapat mengganggu pertumbuhan terumbu karang (Dwi, 2014). Terumbu karang merupakan rumah bagi banyak spesies laut. Keberadaan terumbu karang menjaga pasokan ikan bagi manusia. Upaya pelestarian dan pencegahan penyu dari kepunahan hendaknya gencar dilakukan, mengingat peranan penyu bagi keseimbangan ekosistem.

Dalam wawancara mendalam, hampir semua responden menyatakan belum terpikir untuk mengganti penyu dengan hewan lain. Hal ini berkaitan dengan tradisi yang telah ada turun temurun, begitu pula dengan pernyataan apabila pemerintah pusat menetapkan larangan pemanfaatan penyu. Namun beberapa responden lainnya setuju apabila penyu diganti dengan hewan lain dan ditetapkan aturan mengenai larangan pemanfaatan penyu secara ekstraktif.

Tabel 16. Pendapat tentang pelarangan penggunaan penyu dan pergantian terhadap hewan lain.

Responden	Setuju	Tidak Setuju
Warga yang telah menikah	9	5
Aparat pemerintah	1	4
Kepala Suku	-	1
Total	1	10

Sumber : Data primer, 2017

Aparat pemerintah setempat belum membuat Peraturan Desa (Perdes) mengenai pemanfaatan penyu dalam mengendalikan pemanfaatan penyu, sehingga larangan terhadap pemanfaatannya belum begitu kuat, dan penegakan sanksi adat bagi oknum yang melanggar belum berjalan dengan seharusnya. Kekhawatiran terhadap punahnya penyu tidak tampak bagi beberapa responden. Namun responden lainnya menyatakan bahwa responden khawatir penyu akan punya, karena penyu mulai sulit untuk ditemukan.

Tabel 17. Kekhawatiran terhadap Kepunahan Penyu

No	Responden	Ya	Tidak
1	Warga yang telah menikah	4	1
2	Aparat pemerintah	2	3
3	Kepala Suku	1	-
Total		7	4

Sumber : Data primer, 2017

Kekhawatiran akan kepunahan penyu oleh responden didasarkan pada keberlanjutan dan eksistensi tradisi serta upacara adat dalam pemanfaatan penyu di Pulau Enggano, bukan semata-mata dampak yang akan ditimbulkan di masa yang akan datang. Sementara responden yang menyatakan tidak khawatir penyu akan punah berpendapat bahwa penyu masih banyak di lautan. Wawancara mendalam juga dilakukan terhadap nelayan yang sering tergabung dalam *panama'au* regu pencari penyu. Menurutnya, populasi penyu saat ini telah berkurang dan tinggal 70% lagi jumlahnya di laut sekitar pulau Enggano.

Upaya pelestarian melalui penangkaran penyu di pulau Enggano belum ada, akan tetapi responden memberikan respon yang baik apabila ada penangkaran di pulau Enggano, selain dapat menjaga populasi penyu di laut, penangkaran ini diharapkan dapat menambah pemasukan daerah maupun pendapatan masyarakat, dengan banyaknya wisatawan yang datang ke penangkaran di pulau Enggano.

Hukum Adat Masyarakat Pulau Enggano . Menurut Sukanto dalam Regawino (2008), hukum adat adalah keseluruhan adat-adat yang tidak dicitakan, tidak dikodifikasi, bersifat paksaan dan memiliki sanksi. Van Dijk dalam Regawino (2008) juga mengatakan hukum adat bersumber dari alat-alat perlengkapan masyarakat dan tidak tertulis dan ada juga yang tertulis. Hukum adat yang berlaku tersebut memiliki sanksi terhadap peraturan adat tersebut.

Hukum adat yang berlaku dalam masyarakat pulau Enggano terdiri dari hukum yang tertulis dan tidak tertulis. Salah satu hukum adat yang tertulis tersebut, tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Suku, No: 02/KPS/Ka.S/E/2009 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam, Satwa dan Hewan, serta Pembukaan Lahan, Pengolahan dan Pelestarian Kawasan Pesisir Pulau Enggano dalam Upaya Penyelamatan Pulau Enggano dari Ancaman Abrasi. Hukum adat ini yang berkaitan dengan penelitian mengatur tentang pemanfaatan penyu yang hanya boleh digunakan pada acara pesta adat, sementara untuk jumlah penyu yang boleh dimanfaatkan diatur berdasarkan keputusan tidak tertulis dari kepala suku, hal ini sesuai dengan pernyataan Terhaar dalam Regawino (2008), hukum adat adalah peraturan yang berasal dari keputusan-keputusan kepala adat dan berlaku spontan.

Pemanfaatan penyu yang dilakukan oleh masyarakat Enggano memperlihatkan suatu pertentangan terhadap UU No. 5 tahun 1990, PP No. 7 tahun 1999, PP No. 8 tahun 1999, PP No.13 tahun 1994. Keempat hukum negara ini mengatur perlindungan dan pengawetan terhadap satwa/tumbuhan liar yang dilindungi, sekalipun PP No. 8 menjelaskan bahwa salah satu pengawetan/perlindungan dapat dilakukan dengan berburu, namun berburu yang dimaksud bukanlah terhadap hewan yang dilindungi. PP No. 13 tahun 1994 menjelaskan lebih rinci mengenai perburuan yang boleh dilakukan. Apabila ada hewan yang dilindungi yang dapat

diburu, maka hal tersebut berdasarkan ketetapan Menteri, akan tetapi penyu tidak termasuk hewan dilindungi yang dapat diburu.

Pemanfaatan dengan cara dikonsumsi ini mengakibatkan penurunan kepadatan populasi penyu. Penyu mampu bertelur hingga ratusan butir per tahun, namun hanya beberapa saja yang dapat menetas lalu bertahan hidup di lautan. Pertentangan hukum adat dan hukum negara membuat penegakkan hukum menjadi tidak efektif karena melibatkan masyarakat adat dalam jumlah besar, tidak hanya oknum-oknum tertentu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Tradisi pemanfaatan penyu di pulau Enggano telah berlangsung secara turun temurun. Terdapat dua upacara adat yang wajib menggunakan penyu yaitu upacara pernikahan adat dan upacara buka pantang bagi Kepala Suku yang meninggal dunia. Upacara lain yang kadang-kadang (tidak wajib) menggunakan penyu ialah peresmian kampung baru, acara serah terima jabatan Kepala Desa, acara syukuran, acara tahun baru, dan acara penyambutan tamu kehormatan.
2. Rata-rata kebutuhan penyu di Enggano untuk sebuah pesta pernikahan adat dari bulan Maret - Oktober 2016 ialah sebanyak 16 ekor, sedangkan kebutuhan dagingnya mencapai 11,2 ton/tahun. Jumlah pesta pernikahan adat dalam setahun tidak diketahui secara pasti.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, R.M. 2016. Teknik Analisis Data Kualitatif, Kuantitatif, Menurut Para Ahli. www.pastiguna.com (Diakses 11 April 2017)
- Anonim. 2017. Interaksi. <http://id.wikipedia.com> (Diakses pada 11 April 2017)
- Anonim. 2015. Pengertian Kebutuhan. www.porosilmu.com (Diakses pada 20 April 2017)
- Anonim. 2014. Manfaat Penyu Bagi Kesehatan: Penyembuh Berbagai Penyakit. www.detikLife.com (Diakses pada 3 Maret 2017)
- Agustina, A.E. 2009. Habitat Bertelur Dan Tingkat Keberhasilan Penetasan Telur Penyu Abu-Abu (*Lepidochelys olivacea* Eschsholtz 1829) di Pantai Samas dan Pantai Trisik Yogyakarta. Skripsi Program Studi Biologi Fakultas Teknobiologi Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Ardiwinata. 2012. Asas Kebutuhan. www.file.upi.edu (diakses pada 20 April 2017)
- Astirin, O.P. 2000. Permasalahan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Indonesia. Jurnal Biodiversitas Vol.1 No.1
- Azkab, M.H. 1999. Penyu Hijau (*Chelonia Mydas* L.) yang Senang Melahap Lamun Hijau yang Segar. Oseana, Volume XXIV, Nomor 2, 1999.
- Baihaqi, A. 2014. Morfologi Penyu. www.artikelbermutu.com (Diakses 6 April 2017)
- BKSDA NTB. 2017. Press Release: Pelepasliaran Penyu Bersama Menteri BUMN RI dalam Rangka HUT BUMN Ke – 22. www.menlhk.go.id (Diakses 11 April 2017)
- Fajar, J. 2014. Penyu Sisik, Penyu Pengembara yang Terancam Punah. www.mongabay.com (Diakses pada 26 Juli 2017)
- Firdaus. 2014. Ilmu Ekonomi. www.cs.unsyiah.ac.id (Diakses pada 20 April 2017)
- Guntoro, J. 2008. Menatap Masa Depan Penyu Laut Sebagai Salah Satu Penyangga Kehidupan Manusia. www.satucitafoundation.org (Diakses pada 26 Juli 2017)
- Harahap, I.M., A. Fahrudin., Y. Wardiatno. 2015. Pengelolaan Kolaboratif Kawasan Konservasi Penyu Pangumbahan Kabupaten Sukabumi. Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia (JIPI) Vol.20 No. 1

- Herimanto. 2010. Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Bumi Aksara, Jakarta.
- Herminingrum, I.Y., dan A. Maliya. 2017. Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Penyakit DBD dengan Upaya Pencegahan DBD di Desa Sukorejo Musuk Boyolali. Berita Ilmu Keperawatan 2017. Journals.ums.ac.id (Diakses pada 20 Juli 2017)
- Istichomah, S. 2011. Perubahan Pola Interaksi Masyarakat dengan Hutan di Desa Cipeuteuy Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Skripsi Departemen Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.
- KKP. 2009. Pedoman Teknis Pengelolaan Konservasi Penyu. Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Departemen Kelautan dan Perikanan RI.
- Kurniasari, L. 2013. Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan, Tingkat Pendidikan dan Status Pekerjaan dengan Motivasi Lansia Berkunjung ke Posyandu Lansia di Desa Dadirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Skripsi S1 Keperawatan, STIK Muhammadiyah Pekalongan.
- Lekha, D. 2017. Jenis-jenis Penyu dan Ciri-cirinya Paling Lengkap. www.majalahhewan.com (Diakses pada 9 Agustus 2017)
- Liliweri, A. 2014. Pengantar Studi Kebudayaan. Nusa Media, Bandung.
- Muhajir, A. 2016. Belajar dan Melestarikan Penyu di TCEC Serangan. www.mongabay.co.id (Diakses pada 11 April 2017)
- Mulyana, D. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Nuitja. I.N.S. 1992. Biologi dan Ekologi Pelestarian Penyu Laut. I P B Press. Bogor
- Nurliana, M. 2015. Ini Alasan Penyu Dilindungi. www.beritasatu.com (Diakses 26 Juli 2017)
- Nurrohman, H. 2013. Program Bimbingan dan Konseling Berbasis Nilai – nilai Budaya untuk Meningkatkan Kemampuan Diri Peserta Didik SMAN Kota Palangkaraya. www.repository.upi.edu (Diakses pada 23 Maret 2017)
- Pratiwi, B.W. 2016. Keragaman Penyu dan Karakteristik Habitat Penelurannya di Pekon Muara Tembulih, Ngambur, Pesisir Barat. Skripsi Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung.
- Purnama, M. 2015. Penyu Hijau – Penjelajah Laut Pasifik yang dalam Ancaman Serius. www.pecintasatwa.com (Diakses pada 26 Juli 2017)
- Rahman, A. dan B. Rachmad. 2011. Konservasi Biota Terancam Punah, Penyu Sisik. Materi Penyuluhan Kelautan & Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Rahmat, A., 2016. Studi Penyu di Pulau Enggano Bengkulu. Skripsi Program Studi Kelautan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu.
- Rosadi, H. 2014. Pusat Konservasi Penyu Hijau di Pulau Derawan, Tema: “*Biomimetic Architecture*”. Skripsi Jurusan Teknik Arsitektur, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Setyawan, D., F. Rohman, H. Sutomo. 2015. Kajian Etnozoologi Masyarakat Desa Hadiwaarno Kabupaten Pacitan dalam Konservasi Penyu sebagai Bahan Penyusunan Booklet Penyuluhan Masyarakat. Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia Vol 1 No. 3
- Soekanto, S. 2009. Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta, Bandung
- Suhartini. 2009. Kajian Kearifan Lokal Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber daya Alam dan Lingkungan. Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan MIPA, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Suhartini. 2009. Peran Konservasi Keanekaragaman Hayati Dalam Menunjang Pembangunan Yang Berkelanjutan. Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan MIPA, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Yogyakarta.

- Susanto, H. 2016. Meningkatkan Peran Masyarakat dalam Konservasi di Pesisir Kalbar. www.wwf.or.id (Diakses pada 11 April 2017)
- Tambunan, R. 2008. Perilaku Konservasi Pada Masyarakat Tradisional. Jurnal Harmoni Sosial. Vol. II No. 2
- Tim Responsible Marine Tourism. 2015. Best Environmental Equitable Practices: Seri Mengamati dan Berinteraksi dengan Satwa Laut. Edisi 1. November 2015. WWF Indonesia
- Trapsilowati, W., A. Pujiyanti., Ristiyanto. 2014. Peran Pengetahuan dan Tingkat Pendidikan Terhadap Perilaku Pengendalian Vektor DBD Pada Masyarakat di Kelurahan Endemis di Kota Samarinda Tahun 2009. Jurnal Vektora Volume 6 Nomor 2.
- Winata, A., dan E. Yuliana. 2010. Peran Masyarakat Pesisir dalam Penerapan Strategi Konservasi Sumber daya Laut. Jurnal Matematika, Sains dan Teknologi Vol. 11 No.2
- Wiratno, D. Indriyo., A. Syarifudin., dan A . Kartikasari,. 2004. Berkaca di Cermin Retak: Refleksi Konservasi dan Implikasi Bagi Pengelolaan Taman Nasional. Bogor: The Gibbon Foundation Indonesia, Departemen Kehutanan, PILINGO Movement, Forest Press.
- Yasri. 2015. Pengertian Keanekaragaman Hayati dan Tingkatannya. www.genggaminternet.com (Diakses pada 23 Maret 2017)
- Yayasan Penyu Laut Indonesia. 2012. Mengenal Penyu. www.Seaturtle.or.id (diakses pada 6 April 2017)
- Zuhud. 1989. Strategi Pelestarian dan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Tumbuhan Obat di Indonesia. Jurnal Media Konservasi Vol. II No. 4.